

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya, dan agar peserta didik tersebut mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia serta ketrampilan yang dibutuhkan dalam kehidupannya, masyarakat bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Dalam rangka penuntasan progam “*Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun*” pemerintah semakin gencar menggalakan dan ikut serta dalam memfasilitasi adanya pendidikan. Hal ini senada dengan semangat dan jiwa Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan Pasal 32 dan UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengatur mengenai sistem pendidikan khusus dan layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kebijakan pemerintah ini mendapat dukungan dari seruan internasional yaitu *Education For All* (EFA) yang diserukan oleh UNESCO sebagai kesepakatan global hasil dari *World Education Forum* di Dakar Sinegal tahun 2000.<sup>2</sup>

Di Indonesia melalui keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 002/U/1986 telah dirintis pengembangan sekolah berbasis inklusi, dengan demikian berkewajiban juga melayani penuntasan wajib belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Selama dekade ini anak-anak berkebutuhan khusus banyak mendapatkan pendidikannya di sekolah segregasi di sekolah luar biasa (SLB) dan sekolah dasar luar biasa (SDLB) padahal sekolah-sekolah tersebut biasanya berjumlah terbatas dan lokasinya hanya di kota-kota kabupaten, dengan demikian keberadaan sekolah tersebut belum mampu mengakomodir kebutuhan anak-anak

---

<sup>1</sup> Sarbini, *Perencanaan Pendidikan*, (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2011), 4.

<sup>2</sup> Dadang Garinda, *Pendidikan Inklusif*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 3.

berkebutuhan khusus yang ada di pelosok-pelosok desa yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan.<sup>3</sup>

Di dalam dunia pendidikan terlebih pada pendidikan inklusi sangat membutuhkan adanya layanan bimbingan dan konseling. Keadaan kelas inklusi yang di dalamnya ada siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus sangat dimungkinkan adanya perbedaan yang mencolok baik perbedaan kecerdasan, kebiasaan, karakter, kebutuhan dan kepribadian, hal yang demikian ini dapat memicu timbulnya rasa minder bahkan sampai aksi bullying. Oleh karena itu peran dari bimbingan dan konseling sangat dinanti kehadirannya dalam rangka mereduksi serta menetralkan keadaan, karena salah satu fungsi dari bimbingan dan konseling adalah adaptasi, dimana setiap individu dibimbing agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya layanan bimbingan dan konseling pada sekolah inklusi bertujuan untuk membantu siswa agar memiliki kepribadian yang baik, percaya diri, tidak minder dengan kekurangannya dan mampu mengoptimalkan segala kemampuan serta potensi yang ada pada dirinya. Selain itu layanan bimbingan dan konseling juga membentuk karakter mandiri dan menerima serta menghormati setiap perbedaan. Karena pada dasarnya setiap manusia terlahir berbeda, baik secara fisik, mental dan kepribadian. Kesadaran dan rasa menghormati segala macam bentuk perbedaan akan terbentuk melalui program layanan bimbingan dan konseling.<sup>5</sup>

Anak berkebutuhan khusus belakangan ini semakin akrab di telinga masyarakat, akan tetapi sebagian besar dari masyarakat kurang memiliki pemahaman dengan apa pengertian anak berkebutuhan khusus tersebut, adakalanya masyarakat menerjemahkan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang cacat secara fisik, meskipun pendapat ini tidak bisa sepenuhnya dikatakan salah, akan tetapi lebih tepat mendivinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai anak yang berbeda dengan mayoritas anak yang

---

<sup>3</sup> Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Madrasah Berbasis Integrasi*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 2015), 7.

<sup>4</sup> Ahammad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling Dalam Semua Latar Kehidupan*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 9.

<sup>5</sup> Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Madrasah Berbasis Integrasi*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 2015), 10.

normal lainnya dalam karakteristik mental, kemampuan sensorik, kemampuan berkomunikasi, tingkah laku sosial, atau karakteristik fisik. Pada siswa yang berkebutuhan khusus memiliki penanganan yang berbeda-beda, sama halnya pada anak normal, tidak mungkin menggunakan pendekatan yang sama karena kepribadian dan kecenderungan setiap siswa berbeda beda antara satu dengan yang lainnya, salah satunya adalah *vision impairment* atau tuna netra.<sup>6</sup>

Sejarah panjang pendidikan inklusi yaitu berawal pada tahun 1950 an dan 1960-an, bermula dari gerakan memperjuangkan hak-hak sipil orang Amerika-Afrika dalam menentang politik diskriminatif ras dan warna kulit, ahirnya gerakan ini meluas dan mulai mempengaruhi pandangan mengenai penyandang disabilitas.<sup>7</sup> Dalam putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa berdasarkan Amandemen keempat belas, diskripsi semena-mena terhadap kelompok orang apapun dianggap melanggar hukum. Pengadilan kemudian menerapkan konsep ini kepada pendidikan anak normal ataupun anak penyandang disabilitas, keputusan pengadilan ini mengenalkan konsep intergrasi ke dalam pendidikan masyarakat, yaitu gagasan bahwa satu-satunya cara untuk melindungi hak konstitusional siswa atas kesempatan yang setara adalah dengan memastikan bahwa kelompok siswa yang beragam baik yang normal ataupun penyandang disabilitas untuk belajar secara bersama-sama.<sup>8</sup>

Tidak lama setelah itu para anak-anak penyandang disabilitas mulai diakui sebagai salah satu kelompok lain yang hak-haknya sering dilanggar akibat diskriminasi yang semena-mena. Bagi anak-anak ini, bentuk diskriminasi yang mereka alami berupa penolakan akses terhadap pendidikan karena kondisi disabilitas mereka. Para tokoh pemrakasa pun mulai mendebatkan bahwa pendidikan anak penyandang disabilitas bukanlah sekedar kewajiban moral sekolah

---

<sup>6</sup> Lagita Manastas, *Strategi Mengajar Siswa Tunanetra* (Yogyakarta: Imperium, 2014), 1.

<sup>7</sup> Marliyn Friend and William, *Menuju Pendidikan Inklusi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 17.

<sup>8</sup> Marilyn Friend and William D. Bursuck, *Menuju Pendidikan Inklusi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), 22.

negeri, melainkan juga hak sipil yang dimiliki oleh setiap anak, tanpa memedulikan adanya disabilitas atau kebutuhan khusus.<sup>9</sup>

Seiring dengan proses perkembangannya, Pendidikan khusus juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti konteks sosial dan politik pada saat itu, prakarsa orang tua, gerakan hak-hak sipil, kasus-kasus peradilan, serta peraturan hukum hak sipil dan perundangan Pendidikan umum pada masa itu. Ketika Pendidikan wajib belajar masyarakat di mulai menjelang pergantian abad ke dua puluh, hampir tidak ada program sekolah yang disediakan untuk siswa penyandang disabilitas, para siswa yang keterbatasannya relative sedang, misalnya, ketidakmampuan belajar, gangguan perilaku, atau gangguan fisik ringan, akan dididik Bersama-sama dengan siswa normal lainnya, karena kebutuhan mereka dianggap tidak luar biasa. Sementara itu anak penyandang gangguan fisik berat atau gangguan kecerdasan sering kali tidak mengikuti pelajaran di kelas-kelas atau fasilitas Pendidikan yang lain, sedangkan sisanya dididik di Lembaga-lembaga swasta atau tinggal di suatu institusi.<sup>10</sup>

Faktor yang berperan sangat sentral pada pendidikan khusus adalah pengesahan peraturan hukum untuk mengatur pendidikan bagi seluruh siswa, termasuk para disabilitas, peraturan hukum yang dinilai berhasil meraih cakupan luas adalah *Elementary and Secondary Education Act of 1969 (ESEA)*. Selain itu terdapat pula *No Child Left Behind Act (NCLB)* yang baru-baru ini disahkan kembali pada tahun 2002 dan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh siswa, termasuk mereka yang hidup dalam garis kemiskinan, memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas.<sup>11</sup>

Dengan lahirnya undang-undang tersebut, ditambah dengan ketetapan federal yang baru-baru ini dikembangkan terkait dengan keleluasaan persyaratan *ESEA (U.S. Department of Education, 2012)*, maka hal ini berarti terdapat perintah untuk meningkatkan

---

<sup>9</sup> Marilyn Friend and William D. Bursuck, *Menuju Pendidikan Inklusi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), 18.

<sup>10</sup> Marilyn Friend and William D. Bursuck, *Menuju Pendidikan Inklusi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), 90.

<sup>11</sup> Marilyn Friend and William D. Bursuck, *Menuju Pendidikan Inklusi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), 6.

standar akademis serta pertanggungjawaban pada seluruh siswa, termasuk siswa penyandang disabilitas.<sup>12</sup>

Pendidikan inklusi sebagai sebuah program yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan berkembang menyesuaikan kebutuhan siswa itu sendiri. Salah satu dari perkembangan dan penyempurnaan pendidikan inklusi adalah adanya manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah / madrasah inklusi. Program manajemen pelayanan bimbingan dan konseling memiliki kontribusi penting pada sekolah inklusi dalam rangka menelaraskan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Karena layanan bimbingan dan konseling mengadakan hubungan timbal balik antara konselor (guru pembimbing) dengan konseli (siswa yang dibimbing). Dengan adanya peran aktif konselor kepada peserta didik baik yang normal ataupun berkebutuhan khusus dapat membantu mereka menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya.<sup>13</sup>

Menurut Dadang Garnida terdapat lima tugas konselor di lingkungan pendidikan yang berbasis inklusi. Pertama *providing the students an oppurtuny to talk trough his problems*, (konseling memberi kesempatan bagi siswa untuk membicarakan seluruh permasalahannya melalui proses konseling). Kedua *conseling with potential droup outs* (mengonseling siswa-siwa yang berpotensi droup out). Ketiga *conseling with students concerning academic failure* (konseling tentang kegagalan siswa dalam belajar). Keempat *conseling wth students in evaluating personal assets and limitations* (konseling tentang evaluasi potensi-potensi siswa dan hambatan-hambatannya). Kelima *conseling with students concerning learning diffculties* (konseling tentang kesulitan belajar siswa).<sup>14</sup>

Guru BK di sekolah harus merealisasikan program layanan bimbingan dan konseling pada waktu yang sudah direncanakan dalam satu tahun pelajaran sebagai perwujudan implementasi pelayanan manajemen bimbingan dan konseling. Seorang guru BK

---

<sup>12</sup> Marilyn Friend and William D. Bursuck, *Menuju Pendidikan Inklusi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), 9.

<sup>13</sup>Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrasi*(Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007), 16.

<sup>14</sup> Dadang Garinda, *Pengantar Pendidikan Inklusif* (Bandung: Refika Aditama, 2018),67.

di harapkan pro aktif mewujudkan pelayanan bimbingan dan konseling pada sekolah inklusi, hal ini disebabkan karena sekolah inklusi mengakomodir kebutuhan siswa normal dan juga mengakomodir siswa berkebutuhan khusus. Kreatifitas guru BK dan inovasi-inovasinya di harapkan mampu memberikan pelayanan bimbingan dan konseling tanpa adanya diskriminasi antar siswa yang normal dan siswa berkebutuhan khusus.<sup>15</sup>

Manajemen pelayanan bimbingan dan konseling pada sekolah inklusi sangatlah penting. Karena kehadirannya dapat membantu mengatasi permasalahan atau problem yang dialami oleh peserta didik, baik siswa yang normal ataupun siswa berkebutuhan khusus. Pelaksanaan manajemen pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk menumbuhkan sifat kemandirian peserta didik, khususnya adalah anak berkebutuhan khusus. Karena permasalahan terbesar yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus yaitu hilangnya prilaku mandiri dan ketergantungan bantuan orang lain dalam melakukan aktifitas sehari-harinya.<sup>16</sup>

Seorang guru BK ketika menghadirkan program layanan bimbingan dan konseling di lembaga pendidikan umum/ madrasah inklusi wajib berstandar pada *need assesment* siswa yang dibimbing, dengan demikian program manajemen pelayanan bimbingan dan konseling bisa tepat sasaran dan menyesuaikan karakteristik siswa masing-masing.<sup>17</sup> Konselor harus menyusun program-program layanan bimbingan dan konseling, baik program harian, program mingguan, program bulanan dan program tahunan. Tujuan penyusunan program yaitu agar kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah inklusi tersebut dapat terlaksana dengan lancar dan efisien.<sup>18</sup>

Adapun prinsip-prinsip manajemen pelayanan bimbingan dan konseling pada sekolah / madrasah inklusi adalah relevansi, praktis, fungsional, fleksibilitas, berorientasi pada peserta didik, kontinuitas,

---

<sup>15</sup> Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*, (Depok : Ar-Ruz Media,2013),11.

<sup>16</sup> Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrasi*(Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007), 25.

<sup>17</sup> Sugiyo, *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Semarang : Widya Karya, 2011), 48.

<sup>18</sup> Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrasi*(Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007), 27.

integratif, program kompensatoris, efektifitas dan efisien.<sup>19</sup> Kurikulum merupakan dasar yang sangat penting dan tidak mungkin untuk di tiadakan karena berfungsi menata arah dan tujuan Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak didik tanpa mengabaikan hak-haknya yang belum tercapai. Dengan kata lain kurikulum merupakan bagian penting dari setiap perencanaan Pendidikan yang mempengaruhi arah dan tujuan anak didik dalam Lembaga Pendidikan.<sup>20</sup>

Keberadaan manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah/ madrasah inklusi dapat menjadi jawaban dari semboyan lama yaitu “sekolah untuk semua” dalam rangka mereformasi layanan pendidikan termasuk layanan bimbingan dan konseling yang ramah terhadap semua anak, baik anak normal ataupun anak dengan kebutuhan khusus. Model layanan bimbingan dan konseling di sekolah inklusi ini menjadi landasan manajemen pelayanan bimbingan dan konseling yang sempurna dengan tidak adanya pembeda kepada peserta didik termasuk kepada peserta didik dengan kebutuhan khusus.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil observasi Madrasah Aliyah Tarbiyatul Islamiyah adalah salah satu madrasah yang menyelenggarakan program Pendidikan inklusi di kabupaten pati sejak 3 tahun lalu. Pada tahun ini madrasah Aliyah Tarbiyatul Islamiyah memiliki 5 siswa yang memiliki kebutuhan khusus, dengan menggunakan model kelas inklusi penuh, serta pihak sekolah memberikan pendampingan khusus melalui peran guru pendamping kepada siswa dengan kebutuhan khusus tersebut.<sup>22</sup> peneliti memilih madrasah aliyah Tarbiyatul Islamiyah sebagai obyek penelitian karena memiliki keunikan tersendiri. Keunikan di sini adalah satu-satunya madrasah yang memiliki program Pendidikan inklusi di wilayah kabupaten pati. Dengan menggunakan system pengelolaan kurikulum khusus yang ampu mengakomodir kebutuhan semua peserta didik, baik peserta didik yang normal ataupun peserta didik dengan kebutuhan khusus,

---

<sup>19</sup> Garnida Dadang, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, (Bandung :PT. Refika Aditama, 2015), 83-84.

<sup>20</sup> Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*, (Depok : Ar-Ruz Media,2013),168.

<sup>21</sup> Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrasi*(Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007), 20.

<sup>22</sup> Hasil Observasi di Madrasah Aliyah Tarbiyatul Islamiyah

layanan tersebut dilaksanakan secara alami tanpa ada penugasan khusus dari pemerintah setempat, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “*Manajemen Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Inklusi Tarbiyatul Islamiyah Batangan Pati*”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah batasan sebuah permasalahan yang menjadi titik perhatian dalam penelitian.<sup>23</sup> Adapun fokus penelitian yang terkait dengan pembahasan diatas adalah pada permasalahan bagaimana *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Inklusi Tarbiyatul Islamiyah Batangan Pati*. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian sebagaimana berikut :

1. Pelaksanaan Manajemen Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah inklusi Tarbiyatul Islamiyah Batangan Pati, yang proses pembelajarannya digabung antara ABK dengan anak normal
2. Tentang Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Manajemen Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Inklusi Tarbiyatul Islamiyah Batangan Pati.
3. Implikasi Pelaksanaan Manajemen Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Inklusi Tarbiyatul Islamiyah Batangan Pati.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Manajemen Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Inklusi Tarbiyatul Islamiyah Batangan Pati?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Pelaksanaan Manajemen Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Inklusi Tarbiyatul Islamiyah Batangan Pati?
3. Bagaimanakah Implikasi Manajemen Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Inklusi Tarbiyatul Islamiyah Batangan Pati?

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* ,(Bandung : Alfabeta,2005), 40.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang, fokus penelitian dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Manajemen Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Madrasah Inklusi Tarbiyatul Islamiyah Batangan Pati.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan factor penghambat dalam Pelaksanaan Manajemen Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Inklusi Batangan Pati.
3. Untuk mengetahui implikasi Manajemen Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Inklusi Tarbiyatul Islamiyah Batangan Pati.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Penelitian ini sedikit banyak memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pendidikan khususnya di bidang manajemen pelayanan bimbingan dan konseling terutama dalam ruang lingkup madrasah inklusi.
  - b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil dari pengamatan langsung serta dapat memakai penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selain studi di perguruan tinggi, dan juga menambah pengetahuan dalam melakukan inovasi manajemen pelayanan bimbingan dan konseling pada madrasah inklusi.
2. Manfaat Praktis
  - a. Menjadi rancangan perumusan dalam pengembangan lembaga pelayanan bimbingan dan konseling di madrasah inklusi.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan dalam sistem manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah inklusi.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi lembaga pendidikan

agama khususnya madrasah aliyah inklusi pada umumnya dan khususnya bagi Madrasah Aliyah Inklusi Tarbiyatul Islamiyah Batangan Pati.

Sedangkan ditinjau dari kemanfaatan secara individual maupun institusional, penelitian ini mempunyai manfaat diantaranya:

1. Bagi Peneliti
  - a. Memperkaya khazanah keilmuan terutama dalam bidang manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di madrasah inklusi.
  - b. Sumbangsih peneliti di bidang keilmuan manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di madrasah inklusi di seluruh pelosok Indonesia.
2. Bagi Pascasarjana IAIN Kudus
  - a. Sebagai sumber data pengayaan keilmuan yang mengintegrasikan ilmu manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di madrasah inklusi.
  - b. Memperkaya referensi dan literatur mahasiswa pascasarjana yang tertarik dalam mendalami ilmu manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di madrasah inklusi.
3. Bagi Lembaga Pendidikan
  - a. Sebagai sumber data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di madrasah inklusi.
  - b. Sebagai dasar perencanaan kebijakan dalam mengatur sistem manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di madrasah inklusi.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai pokok-pokok pembahasan tesis ini, maka disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **1. Bagian Awal**

Dalam bagian ini, terdiri atas: halaman sampul (*cover*), halaman judul, nota persetujuan pembimbing, halaman pernyataan keaslian, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar,

daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dan daftar lampiran.

## 2. Bagian Isi

Dalam bagian ini memuat:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tesis.

### BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini terdapat dua subbab, subbab *pertama* yaitu pelaksanaan manajemen pelayanan bimbingan dan konseling yang meliputi pengertian manajemen bimbingan dan konseling, pengertian manajemen, bimbingan dan konseling, landasan manajemen bimbingan dan konseling. Subbab *kedua* yaitu madrasah inklusi yang meliputi pengertian madrasah inklusi beserta sejarah perkembangannya dan juga konsep, teknik, pendekatan bimbingan dan konseling.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengujian keabsahan data serta penyajian data.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari tiga subbab. Sub bab *pertama* yaitu tentang gambaran umum madrasah inklusi Tarbiyatul Islamiyah Batangan Pati. Sub bab *kedua* berisi tentang hasil penelitian terkait pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling di madrasah Aliyah inklusi Tarbiyatul Islamiyah Batangan Pati. Sub bab *ketiga* berisi tentang analisis dan pembahasan dari hasil penelitian yang sudah didapat.

### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban akhir dari permasalahan penelitian, dan saran yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini memuat daftar pustaka, daftar lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.

